

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tinjauan Objek Studi

1.1.1 Gambaran Umum

Perjalanan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, adalah sebuah jejak-jejak panjang penuh liku. Hal ini terkait dengan sejarah berdirinya Negara tercinta ini, yang memiliki masa-masa pahit takala Belanda dan Jepang menacapkan cakar tajamnya di masa penjajahan. Masa demi masa terlewati, mengukir catatan demi catatan. Masing-masing masa memiliki sejarah tersendiri. Tentu saja ini bukan hanya sekedar catatan, namun makna di dalamnya dapat dijadikan acuan menuju gerbang profesionalisme Lembaga Pemasyarakatan untuk menjawab tantangan dimasa depan.

Sejarah pembentukan pemasyarakatan berdiri pada 27 April 1964. Sesuai dengan Pasal ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan tata cara peradilan pidana. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pemasyarakatan, dalam upaya perbaikan terhadap pelanggaran hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut DIRJEN Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi sebagai penyiapan perumusan kebijakan departemen dibidang bina registrasi dan statistik, bina perawatan, bina bimbingan kemasyarakatan, bina latihan kerja dan produksi, bina keamanan dan ketertiban masyarakat.

1.1.2 Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

Misi

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder

1.2 Latar Belakang Penelitian

Tuntutan masyarakat kepada organisasi publik untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik. Dalam keadaan seperti ini setiap organisasi yang memberikan pelayanan kepada publik dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya manusia, karena investasi yang paling tinggi bagi suatu organisasi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci sukses atau keberhasilan bagi setiap organisasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Dalam Mangkunegara (2007:2) dikemukakan bahwa MSDM merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian

balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Untuk mendapatkan SDM yang diharapkan dan dapat menunjang kegiatan dan fungsinya, maka organisasi dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan pegawainya. Salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan pegawainya adalah dengan memberikan kompensasi secara adil dan layak. Menurut Hasibuan (2007:118) kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan termasuk organisasi lainnya.

Untuk meningkatkan kinerja pegawai organisasi perlu mengelolah kompensasi sebagai balas jasa atas kerja mereka. Besarnya balas jasa telah ditentukan dan diketahui sebelumnya, sehingga pegawai secara pasti mengetahui besarnya balas jasa atau kompensasi yang akan diterimanya. Kompensasi ini akan dipergunakan pegawai beserta keluarganya untuk memenuhi hidupnya sehari-hari. Hal ini menjadi fenomena yang merupakan masalah praktis di Direktorat JendralPemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan diteliti oleh penulis secara rinci. Masalah empiris dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Sejak terjadinya krisis moneter yang menimpa Indonesia tahun 1997 dan terus berkembang menjadi krisis multidimensi sampai sekarang, kebutuhan biaya hidup semakin meningkat. Hal tersebut pun sangat dirasakan oleh Direktorat JendralPemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tuntutan pegawai dikarenakan kurang terpenuhinya kebutuhan dan ketidak puasan atas pembayaran kompensasi yang diterima, terlihat dari hasil wawancara antara penulis dan pegawai staff administrasi kantor Direktorat JendralPemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Para pegawai masih banyak yang memerlukan uang tambahan sehingga harus meminjam kepada koperasi untuk menutupi kebutuhannya, karena tuntutan kebutuhan setiap individu yang berbeda dan bervariasi. Berikut ini tabel yang menunjukkan kompensasi yang diterima pegawai setiap bulannya berdasarkan golongan

TABEL 1.1**Daftar Kompensasi Pegawai Direktorat JendralPemasyarakatan,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Status Pegawai Golongan	Penghasilan (Rp)/Bulan					Jumlah Bersih Yang Dibayar (Rp)/Bulan
	Gaji. Tunj keluarga	Tunj Umum	Tunj Jabatan	Tunj Beras	Tunj Khusus Pajak	
Gol. II	1.834.600	177.100	728.000	91.500	30.200	2.861.400
Gol. III	2.431.500	129.400	450.700	146.200	66.500	3.222.300
Gol. IV	3.132.100	0	1.758.200	179.500	183.100	5.252.900

Sumber: Daftar Kompensasi DIRJEN Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM 2011.

Table 1.1 menunjukkan data mengenai kompensasi yang diterima oleh pegawai Direktorat JendralPemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan data yang diperoleh Golongan II menerima kompensasi sejumlah Rp. 2.861.400 perbulannya, Golongan III menerima kompensasi sejumlah Rp. 3.222.300 perbulannya, dan Golongan IV menerima kompensasi sejumlah Rp. 5.252.900 perbulannya. Terdapat kompensasi lain yang diberikan manajemen Direktorat JendralPemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memotivasi pegawainya dalam bekerja yaitu dengan cara memberikan uang makan per hari sebesar Rp 20.000 apabila pegawai itu masuk kerja, uang makan tidak akan diterima apabila pegawai tidak masuk kerja dengan alasan apapun.

Pengertian tentang motivasi dikemukakan oleh Sopiah (dalam Dito, 2010: 17) dengan definisi sebagai keadaan di mana usaha dan kemauan keras seseorang diarahkan kepada pencapaian hasil-hasil atau tujuan tertentu. Hasil-hasil yang dimaksud bisa berupa produktivitas, kehadiran atau perilaku kerja kreatif lainnya.

- 2) Masalah praktis yang terjadi di Direktorat JendralPemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini,

kehadiran pegawai menjadi salah satu gambaran mengenai kondisi motivasi dalam suatu organisasi. Berikut merupakan data kehadiran pegawai Direktorat JendralPemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari bulan Juli-Desember 2010 :

Tabel 1.2
Data Rekapitulasi Absensi Pegawai
Direktorat JendralPemasyarakatan, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Juli-Desember) Tahun 2010

Bulan	Jumlah Pegawai	Jumlah Kehadiran Sesuai Jam Kerja	Keterangan Absen (dalam persen)			
			Alfa	Sakit	Telat Masuk	Izin Tidak Masuk
Juli	438	22	47.47	63.39	97.51	52.08
Agus	438	21	31.37	45.31	96.45	49.18
Sept	441	19	39.15	42.75	96.23	57.0
Okto	431	21	37.31	56.21	96.65	45.02
Nov	429	21	35.75	81.9	96.46	50.05
Des	427	22	24.59	46.27	96.99	53.37

*Sumber:*Laporan Rekapitulasi Absensi Direktorat JendralPemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Table 1.2 menunjukkan data absensi pegawai tidak masuk tanpa keterangan, sakit, telat masuk, dan izin tidak masuk. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan rekapitulasi absensi Direktorat JendralPemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diketahui dalam bulan Juli jumlah pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan sebanyak 47.47% sakit sebanyak 63.39%, telat masuk 97.51%, izin tidak masuk sebanyak 52.08% yang dilakukan oleh seluruh pegawai selama bulan Juli. Bulan Agustus jumlah pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan menjadi 31.37%, sakit menjadi 45.31%, telat masuk mengalami penurunan menjadi 96.45%, dan izin tidak masuk mengalami penurunan menjadi 49.18% yang dilakukan oleh seluruh pegawai Selama bulan Agustus. Bulan September 2010 terjadi kenaikan tingkat absensi tidak masuk tanpa keterangan menjadi 39.15%, sakit 42.75%, telat masuk 96.23%, dan izin tidak masuk mengalami kenaikan

menjadi 57.0% yang dilakukan oleh seluruh pegawai. Selanjutnya pada bulan Oktober terjadi penurunan tidak masuk tanpa izin sebanyak 37.31%, sakit mengalami kenaikan menjadi 57.21% telat masuk terjadi peningkatan sebanyak menjadi 96.65%, dan izin tidak masuk menjadi 45.02% yang dilakukan oleh seluruh pegawai. Bulan November terjadi penurunan tidak masuk tanpa keterangan penurunan sebanyak 35.75%,sakit mengalami kenaikan menjadi 81.9%, telat masuk 96.46%, dan izin tidak hadir mengalami peningkatanmenjadi 50.05% yang dilakukan setiap pegawai. Bulan Desember terjadi penurunan tidak masuk tanpa keterangan 24.59%, sakit terjadi peningkatan menjadi 46.27%, telat masuk mengalami peningkatan 96,99%, dan izin tidak hadir mengalami peningkatan menjadi 53.37% kali yang dilakukan seluruh pegawai.

Veithzal (2004:357) mengatakan bahwa kompensasi merupakan salah satu faktor baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi kerja dan kinerja pegawai.

Organisasi dituntut untuk dapat memberikan kompensasi finansial yang sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai. Pelaksanaan kompensasi yang dilakukan dengan baik merupakan alat motivasi pegawai untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi, sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya.

Situasi yang terjadi di Direktorat JendralPemasyarakatan, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian kompensasi yang diterima oleh pegawai, sudah seharusnya pemberian kompensasi terhadap pegawai perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak manajemen organisasi, agar para pegawai dapat dipertahankan dan kinerja pegawai diharapkan akan terus meningkat. Motivasi kerja pegawai memberikan kontribusi yang tinggi terhadap peningkatan prestasi kerja pegawai.

Menurut Samsudin (2006:281) motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Motivasi atau dorongan dimaksudkan sebagai desakan yang alami untuk memuaskan dan mempertahankan kehidupan.

Melihat data absensi pegawai Direktorat JendralPemasyarakatan, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang masih banyak melakukan pelanggaran tentang tidak masuk tanpa keterangan, sakit, telat masuk, dan izin

tidak masuk maka organisasi harus memotivasi pegawai salah satunya dengan cara pemberian kompensasi finansial yang diterima, dan organisasi dalam menentukan tingkat upah harus mempertimbangkan standar kehidupan normal, akan memungkinkan pegawai merasa puas dengan pekerjaannya. Hal ini karena motivasi kerja pegawai banyak dipengaruhi oleh terpenuhinya tidaknya kebutuhan minimal kehidupan pegawai dan keluarganya (Mangkunegara, 2001:84).

Menurut Sadili (2006:187), pemberian kompensasi finansial dapat meningkatkan prestasi kerja dan memotivasi pegawai. Oleh karena itu, perhatian organisasi terhadap pengaturan kompensasi finansial secara rasional dan adil sangat diperlukan. Bila pegawai memandang pemberian kompensasi finansial tidak memadai, prestasi kerja, motivasi maupun kepuasan kerja mereka cenderung akan menurun.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi memiliki hubungan yang erat dengan motivasi. Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah penegak hukum yang memberikan pelayanan publik sangat dituntut perannya dalam masyarakat. Karena itulah motivasi yang tinggi bagi setiap pegawai Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sangat diperlukan untuk menciptakan kinerja yang baik

Menyadari permasalahan yang ada maka perlu diadakan penelitian pengaruh pemberian kompensasi finansial terhadap motivasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila terbukti bahwa komponen kompensasi tersebut berpengaruh terhadap motivasi kerja, maka perlu dilakukan pemeliharaan dan pengembangan kebijakan pemberian kompensasi agar sistem tersebut tetap kompetitif.

Berdasarkan situasi yang melatarbelakangi permasalahan yang telah ada maka penulis bermaksud untuk menguraikan suatu permasalahan melakukan penelitian dengan memfokuskan pada pemberian kompensasi finansial dan tertarik untuk mengadakan penelitian di Direktorat Jenderal Pemasarakatan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan judul : **“Pengaruh Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Di Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian kompensasi finansial berdasarkan persepsi pegawai pada Direktorat JendralPemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana motivasi kerja berdasarkan persepsi pegawai Direktorat JendralPemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana pengaruh pemberian kompensasi finansial terhadap motivasi kerja pegawai pada Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi pegawai mengenai pemberian kompensasi finansial yang telah dilaksanakan Direktorat JendralPemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Untuk mengetahui motivasi kerja pegawai Direktorat JendralPemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial terhadap motivasi pegawai Direktorat JendralPemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai, serta memberi sumbangan baru dalam pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Memberi informasi mengenai pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja pada pegawai Direktorat JendralPemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diharapkan dapat dijadikan masukan yang berarti dalam pengembangan kinerja kantor ke depannya.

1.6

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami materi yang terdapat dalam skripsi, maka penulisan skripsi disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang tinjauan objek studi, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang telah melalui proses pengolahan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan menyajikan saran atau rekomendasi berdasarkan hasil dari penelitian.